

## ABSTRAK

Dengan masih banyaknya wajib pajak yang lalai dan terlambat melaporkan SPT Tahunan penelitian ini dilakukan guna mengkaji mengenai pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu serta hambatan dan solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu terkait hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode wawancara, metode observasi dan kepustakaan. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, yang memfokuskan penelitian mengenai pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan SPT Tahunan dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pajak serta solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu. Wawancara dilakukann dengan narasumber yaitu Kepala Seksi Waskon II. Data diperoleh dari informan seksi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu telah berjalan sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hambatan yang dihadapi antara lain mimimnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai pentingnya melaporkan SPT Tahunan, serta kurangnya tenaga kerja yaitu sumber daya manusia dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mampu berperan secara langsung melaksanakan penegakan hukum pajak.

**Kata Kunci :** Penegakan hukum pajak, wajib pajak, keterlambatan pelaporan, SPT Tahunan

## **ABSTRACT**

*With the number of taxpayers who are negligent and late report the Annual Tax Return This study was conducted to examine the implementation of tax law enforcement on the delay of reporting the Annual Tax Returns by Taxpayers in the Tax Office (KPP) Pratama Semarang Central One as well as obstacles and solutions provided by the Tax Office (KPP) Pratama Semarang Central One related to obstacles faced by Tax Service Office (KPP) Pratama Semarang Tengah One based on Law Number 16 Year 2009 About Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 5 Year 2008 About Fourth Amendment of Law Number 6 Year 1983 on General Provisions and Tax Procedures.*

*The research method used is qualitative research with descriptive research type using sociological juridical approach. Data collection methods used are interview method, observation method and bibliography. The research was conducted in Tax Office (KPP) Pratama Semarang Central One, which focuses on the implementation of tax law enforcement on the delay of annual tax return and the obstacles faced in tax law enforcement and solutions provided by Tax Office (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu. The interview was conducted with resource person namely Section Head Waskon II. Data obtained from the informant section of service Tax Office (KPP) Pratama Semarang Central One.*

*The result of the research shows the implementation of tax law enforcement on the delay of reporting of Annual Tax Return by Taxpayer in Tax Office (KPP) Pratama Semarang Tengah One has been run in accordance with the procedure of Law Number 16 Year 2009 About Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 5 of 2008 About the Fourth Amendment to Law Number 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures. Obstacles encountered include mimimnya awareness and knowledge of taxpayers about the importance of reporting the annual tax returns, as well as the lack of manpower of human resources from the Tax Office (KPP) that can play directly implement tax law enforcement.*

**Keywords :** *Tax law enforcement, taxpayer, reporting delay, Annual Tax Return*